

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan merupakan proses akuntansi terakhir dalam siklus akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan perusahaan. Informasi hasil keuangan tersebut menggambarkan kondisi perusahaan dalam suatu periode. Sehingga, entitas berusaha agar dapat menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan dan informasi lain secara relevan berkaitan dengan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja manajemen dengan baik yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Inayanti & Sukirman, 2016). Oleh karena itu, informasi yang terkandung secara akurat dibutuhkan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan (Rahmatika et al., 2019). Namun kenyataannya penyajian informasi laporan keuangan tidak menjamin bahwa informasi dalam laporan keuangan tersampaikan dalam keadaan perusahaan yang sebenarnya, karena sering kali manajemen menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebetulnya tidak terjadi agar menampilkan kinerja manajemen di dalam laporan keuangan terlihat tetap baik, dengan memanipulasi laporan keuangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak eksternal yaitu investor dan kreditor (Prayoga & Sudarmaji, 2019). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindak kecurangan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020) mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai salah penyajian informasi dengan menghilangkan fakta material sehingga membuat pengguna dan pembaca laporan keuangan mengubah penilainnya dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan yang mengandung kecurangan dapat dibuat dalam beberapa langkah, mulai dari langkah pertama untuk memanipulasi perubahan catatan akuntansi yang dipalsukan atau mengubah dokumen pendukung sebagai sumber data untuk laporan yang diaudit. Banyak contoh kecurangan akuntansi dan ketidaksesuaian seperti manipulasi jumlah pengungkapan, *mark-up*, dan penghapusan data dalam penyajian laporan keuangan (Pamungkas et al., 2018).

Berdasarkan survey terhadap organisasi di wilayah Asia-Pasifik yang dilakukan oleh ACFE (2020) diketahui bahwa 77% responden mengatakan bahwa mereka telah mengamati peningkatan kecurangan secara keseluruhan. dengan sepertiganya mencatat bahwa peningkatan ini signifikan. Dibandingkan dengan hasil survey pada Mei 2020, hasil survey pada Agustus 2020 menunjukkan bahwa persentase responden yang menyatakan telah melihat peningkatan penipuan meningkat dari 68% ke 78%. Selanjutnya para responden meyakini bahwa tren penipuan ini akan terus meningkat.

Banyak fenomena di Indonesia yang dapat menggambarkan tindak kecurangan laporan keuangan. Salah satu kasus yang terdeteksi terkait tindak kecurangan terjadi di sektor industri barang konsumsi yang cukup menarik perhatian masyarakat yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) yang merupakan perusahaan *go public*, yang diduga telah memanipulasi laporan keuangan. Berdasarkan rangkuman sumber dari media online CNBC Indonesia, Jawapos, Detik.com, dan Kontan, kasus ini bermula pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana pemegang saham menolak laporan keuangan tahun 2017 karena diduga pengungkapan laporan keuangan tersebut tidak memadai dan relevan kepada stakeholder. Manajemen baru AISA menunjuk firma audit Indonesia yaitu PT Ernest & Young Indonesia (EY) untuk menginvestigasi kegagalan atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kecurigaan EY terhadap manajemen lama yang membuat dua pencatatan laporan keuangan yang berbeda yaitu data internal dan pencatatan yang digunakan auditor dalam proses audit laporan keuangan tahun 2017 untuk kebutuhan audit eksternal faktanya membuktikan bahwa dalam laporan keuangan AISA tahun 2017 terdapat penggelembungan dana sebesar Rp. 4 Triliun pada beberapa akun yaitu persediaan, piutang, dan asset tetap yang disajikan dalam tabel 1

Tabel 1 Dugaan *Overstatements* pada Laporan keuangan 2017 (Audited)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi PT AISA

Akun	Data Internal	Laporan Keuangan 2017 (Audited)		<i>Over Under-Statement</i>	
Piutang Usaha	662 Miliar	2,1 Triliun	1,4 Triliun	217%	<i>Overstatements</i>
Persediaan	165 Miliar	1,4 Triliun	1,2 Triliun	748%	<i>Overstatements</i>

Aset Tetap	1,3 Triliun	2,7 Triliun	1,4 Triliun	109%	<i>Overstatements</i>
Total	1,861 Triliun	6,2 Triliun	4 Triliun	1074%	<i>Overstatements</i>

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa manajemen lama AISA sengaja melakukan manipulasi laporan keuangan, salah satunya dengan cara memainkan akun piutang. Manajemen lama AISA melakukan penggelembungan dana pada akun piutang sebesar 1,4 triliun dalam laporan tahunan yang telah diaudit dengan melibatkan enam perusahaan terafiliasi yang dicatat sebagai pihak ketiga antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman grup AISA dengan beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh grup AISA, karena direksi atau manajemen lama AISA menjadi pengendali terhadap enam perusahaan distributor tersebut. Sehingga nilai tagihan atau piutang dari perusahaan rekanan naik maka dinaikkannya akun piutang ini berkaitan dengan nilai penjualan AISA yang seolah-olah mengalami kenaikan untuk menunjukkan kondisi ideal perusahaan.

Manajemen seringkali menggunakan akun piutang sebagai tindakan yang rasional dan wajar. Pada prinsipnya karena manajemen menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan selain itu dengan menaikkan akun piutang berdampak pada peningkatan penjualan yang dapat mengesankan laporan keuangan konsolidasi perusahaan dan menyebabkan fundamental entitas terlihat bertumbuh baik. Dengan kenaikan penjualan ini akan menjadi kesan baik bahwa perusahaan sedang mengalami keuntungan. Dengan begitu maka kreditor akan tertarik untuk memberikan pinjaman. Selain itu dapat menggambarkan kepada pihak eksternal bahwa kondisi perusahaan AISA memiliki kinerja manajemen yang baik sehingga dapat menarik para investor dan calon investor untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan AISA. Bahkan komisaris utama AISA juga mengetahui adanya indikasi pelanggaran setelah mendapat konfirmasi dari para pemegang saham ritel AISA yang menemukan adanya pelarian modal ke perusahaan lain yang bukan anak perusahaan AISA melainkan perusahaan lain yang dimiliki oleh direksi. Sehingga dana milik AISA tidak kembali masuk ke perusahaan melainkan dimasukkan ke dalam akun piutang. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya pengungkapan

secara memadai kepada para pemangku kepentingan secara relevan terkait hubungan dan transaksi dengan pihak yang terafiliasi.

Selain itu kesempatan perusahaan AISA dapat melakukan rekayasa laporan keuangan tersebut terdapat kemungkinan besar bahwa entitas tersebut merasa bisa melakukannya karena kurangnya pengawasan. Dalam fenomena PT AISA ini terlihat bahwa fungsi pengawasan aktif dewan komisaris independen tidak efektif terhadap implementasi strategi yang telah dilakukan manajemen perusahaan yang mana manajemen masih bisa melakukan kecurangan dengan melakukan penggelembungan dana meskipun jumlah komisaris independen di PT AISA sudah memenuhi syarat aturan otoritas jasa keuangan (OJK). Kecurangan tersebut terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki oleh orang-orang yang mendominasi organisasi dan mengetahui bahwa terdapat kelemahan dari sistem yang ada.

Berdasarkan fenomena tersebut terlihat bahwa manajemen lama AISA sengaja melakukan manipulasi laporan keuangan, hal ini dilakukan manajemen agar mendapat kesan bahwa perusahaan sedang mengalami keuntungan dan manajemen dianggap memiliki kinerja yang baik dengan merekayasa nilai material yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Motivasinya adalah agar laporan keuangan yang disajikan menggambarkan kondisi perusahaan yang baik dan menarik perhatian para pemangku kepentingan yang dibutuhkan dalam proses penentuan keputusan ekonomi seperti keputusan investor dan calon investor untuk menahan, menjual, atau membeli saham yang mereka investasikan dalam perusahaan, sebab jika perusahaan melaporkan kinerja yang baik secara otomatis dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Dampak kerugian yang diakibatkan tindakan kecurangan tersebut tidak hanya merugikan secara material tetapi juga dapat mengakibatkan turunnya reputasi perusahaan yang merupakan kerugian yang bersifat *non-material*. Tindakan kecurangan juga dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan menjadi masalah utama bagi banyak organisasi (Ruankaew, 2016).

Salah satu faktor pendorong yang menyebabkan kecurangan tersebut menurut Skousen et al., (2009) adalah kesempatan. Kesempatan menurut Skousen et al., (2009) berdasarkan *Statement on Auditing Standard (SAS) No.99* adalah suatu keadaan yang tercipta karena adanya pengawasan yang tidak efektif sehingga dapat memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kesempatan

manipulasi laporan keuangan bisa terjadi dalam tiga situasi umum. Situasi tersebut adalah kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan struktur organisasi.

Kondisi ideal suatu perusahaan dalam bidang industri biasa disebut *nature of industry*. *Nature of Industry* adalah sebuah standar yang mencerminkan keadaan suatu industri secara optimal (Skousen et al., 2009). Laporan keuangan menjadi tolak ukur kinerja suatu industri yang diukur melalui peningkatan volume penjualan baik tunai maupun kredit (piutang). Di laporan keuangan terdapat akun spesifik yang nilainya dapat ditaksirkan oleh perusahaan. Sehingga, manajemen dihadapkan permasalahan yang bersifat subjektifitas mengingat berkembangnya suatu industri, maka semakin beragam jenis kegiatan dan transaksi perusahaan yang semakin kompleks. Kompleksitas perusahaan tentu akan memengaruhi penilaian dan penyajian laporan keuangan karena perusahaan seringkali dapat menggunakan estimasi untuk akun tertentu (Rahman, 2020).

Oleh karena itu, manajer suatu entitas memiliki kesempatan untuk memanfaatkan estimasi akun subjektif sebagai alat untuk memanipulasi. Pada penelitian-penelitian terdahulu *nature of industry* dapat diukur oleh rasio perubahan piutang dan persediaan oleh perusahaan (Summers & Sweeney, 1998). Didukung oleh penelitian Triyanto (2020), Apriyani & Ritonga (2019), dan Inayanti & Sukirman (2016) menunjukkan bahwa *nature industry* yang diukur dengan rasio perubahan piutang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. Peningkatan piutang dari tahun sebelumnya menyebabkan taksiran nilai piutang yang tidak tertagih ikut meningkat. Meningkatnya taksiran piutang yang tak tertagih yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari total penjualan kredit berakibat pada semakin tinggi risiko yang dihadapkan perusahaan merugi. Oleh karena itu tujuan utama manajemen adalah menghapuskan piutang tak tertagih dan manajemen berusaha untuk mengelola laba melalui *judgment* atas taksiran piutang yang tak tertagih untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melaporkan kinerja yang menguntungkan bagi dirinya sendiri untuk memperoleh bonus dan insentif. Maka dari itu, manajemen dinilai berbuat curang dalam laporan keuangan sehingga dapat merugikan para pemangku kepentingan berkaitan dengan informasi yang tersaji secara tidak akurat.

Selain itu, peningkatan piutang dapat mengindikasikan bahwa perputaran kas rendah. Tingginya piutang yang tidak diikuti dengan penerimaan kas mengakibatkan perusahaan menjadi terbatas dalam melaksanakan kegiatan operasional. Keterbatasan kas yang dimiliki perusahaan inilah yang memicu manajemen mengambil keputusan untuk melakukan kecurangan karena tuntutan perusahaan untuk menunjukkan kondisi yang ideal agar manajemen terlihat memiliki kinerja yang baik (Apriyani & Ritonga, 2019).

Namun, hasil sebaliknya ditunjukkan pada penelitian Diansari & Wijaya (2019), Khoirunnisa et al. (2020) dan Suparmini et al. (2020) menunjukkan *nature of industry* yang diukur dengan rasio perubahan piutang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan. Rasio perubahan jumlah piutang pada tahun sebelumnya tidak mampu menunjukkan bahwa peningkatan piutang yang tinggi menyebabkan aliran kas menurun disebabkan kemampuan perusahaan dalam menerapkan kebijakan kredit secara ketat atas jumlah piutang sehingga akun piutang perusahaan dalam kondisi yang dapat dikendalikan dengan begitu penerimaan kas menjadi lancar. Sehingga menutup kesempatan perusahaan untuk melakukan tindak curang dalam pelaporan keuangan

Setiawati (2018), Ijudien (2018), dan Siregar et al (2019) menunjukkan perubahan piutang tidak memiliki hubungan dengan tingkat perputaran kas. Tingginya piutang usaha tidak menghalangi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasional dengan menggunakan jumlah kas perusahaan, sehingga rasio perubahan piutang usaha dianggap tidak dapat memicu manajer melakukan tindak curang dalam pelaporan keuangan.

Kesempatan terjadinya kecurangan juga dapat muncul pada saat terdapat ketidakefektifan pengawasan. Ketidakefektifan pengawasan merupakan suatu keadaan yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian (Skousen et al., 2009). Situasi yang tidak efektif karena lemahnya sistem pengendalian ataupun tata kelola di dalam perusahaan dapat membuka kesempatan organisasi untuk bertindak curang (Abdullahi & Mansor, 2015).

Umumnya indikasi perusahaan yang melakukan kecurangan salah satunya memiliki lebih sedikit jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki lebih banyak dewan komisaris independen (Dunn,

2004). Kurangnya peran pengawasan dewan komisaris independen dalam memantau tindakan manajemen puncak dapat menyebabkan manajemen keluar dari standar dengan melakukan tindakan curang. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak dilakukan secara efektif oleh dewan komisaris independen menyebabkan lemahnya sistem pengendalian internal di perusahaan, sehingga mengakibatkan peluang bagi manajer untuk melakukan penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan. Oleh karena itu, ketidakefektifan pengawasan dapat diukur menggunakan rasio jumlah dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris perusahaan. Semakin kecil rasio jumlah dewan komisaris maka pengawasan menjadi tidak efektif sehingga peluang manajemen puncak dalam melakukan kecurangan akan semakin besar (Skousen et al., 2009).

Hubungan antara ketidakefektifan pengawasan dengan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan diperkuat oleh penelitian Devi et al. (2021), Pane et al. (2020), dan Rahman (2020) yang menggunakan pengukuran rasio dewan komisaris independen menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen mampu mendeteksi kesempatan terjadinya tindak kecurangan. Artinya semakin kecil rasio dewan komisaris independen maka semakin besar kesempatan terjadinya praktik kecurangan. Sementara Diansari & Wijaya (2019), Harman et al. (2020), dan Triyanto (2020) yang menunjukkan bahwa adanya dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Keadaan ini disebabkan dewan komisaris independen di perusahaan hanya sekedar menjalankan tanggung jawab aturan perusahaan, namun tidak bertujuan untuk menegakkan prinsip tata kelola perusahaan dalam mencegah praktik curang dalam pelaporan keuangan. Semakin tidak independennya dewan komisaris maka semakin lemah pengawasan internal perusahaan maka konsekuensinya semakin tinggi tingkat kecurangan.

Perkembangan bisnis saat ini dipengaruhi oleh teknologi informasi yang membawa dampak besar bagi perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, teknologi memainkan peran penting untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan terutama dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Oleh karena itu, transformasi penggunaan teknologi saat ini menjadi sebuah keharusan yang harus diikuti bagi sebuah entitas dan menjadi acuan bagi suatu

perusahaan. Teknologi informasi merupakan penggabungan antara teknologi dan telekomunikasi yang menghasilkan sistem informasi (Brien & Marakas, 2008). Dengan menerapkan teknologi informasi dalam suatu entitas dapat membantu pekerjaan atau operasional perusahaan menjadi lebih mudah. Selain itu, peran teknologi informasi di perusahaan dapat menghasilkan keuntungan seperti meminimalisir kebutuhan biaya, menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan cepat dalam pengambilan keputusan (Caracuel Martínez et al., 2016).

Kesempatan melakukan kecurangan dapat dicegah melalui keberadaan teknologi informasi yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan. Selain itu, penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena teknologi informasi dirancang secara sistematis dan terintegrasi yang dapat memperkecil kesempatan pelaku kecurangan. Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi diikuti juga dengan berkembangnya praktik kecurangan. Teknologi informasi dalam jaringan komputer dapat memicu daya tarik terhadap kecurangan karena memberikan kesempatan bagi para pelaku (Mappadang & Yuliansyah, 2021). Mengacu pada penelitian sebelumnya Suryanto (2016) yang telah membuktikan jika perusahaan menerapkan teknologi informasi dapat menghasilkan laporan keuangan secara akurat karena data yang disajikan dengan menggunakan teknologi terdeteksi secara tepat waktu yang terintegrasi dalam proses bisnis. Oleh karena itu, apabila semakin baik sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi tinggi digunakan disuatu perusahaan maka tindakan individu untuk melakukan praktik kecurangan dapat diminimalisir (Djatkiko et al., 2020).

Perusahaan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan tentunya dengan menerapkan strategi bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Salah satu cara yang digunakan perusahaan adalah menerapkan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP). ERP merupakan sebuah sistem yang mengorganisir antar divisi dalam suatu perusahaan sehingga dengan penerapan ERP diharapkan dapat memberikan informasi secara relevan dan andal (Hapsari, 2019). Selain itu penerapan ERP ini dapat mengurangi peran pekerjaan manajemen secara manual yang kemungkinan besar aktivitas tindak kecurangan

dapat dilakukannya sehingga melalui penerapan ERP yang terintegrasi ini dapat menurunkan kesempatan manajemen untuk melakukan kecurangan (Puspandoyo, 2015). Teknologi informasi ini diyakini dapat memberikan hubungan memperkuat atau memperlemah terhadap unsur-unsur kesempatan dalam melakukan praktik kecurangan (Nicolaou, 2004). Mengacu pada penelitian sebelumnya Suryanto (2016) yang telah membuktikan jika perusahaan menerapkan teknologi informasi dapat menghasilkan laporan keuangan secara akurat karena data yang disajikan dengan menggunakan teknologi terdeteksi secara tepat waktu yang terintegrasi dalam proses bisnis.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terkait hubungan ketidakefektifan pengawasan dan *nature of industry* terhadap kecurangan laporan keuangan yang dimoderasi oleh teknologi informasi. Peran teknologi sebagai wujud pengendalian internal dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang terintegrasi, cepat, dan akurat sehingga memperlemah praktik terjadinya kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian cukup substansial untuk memahami hubungan peran teknologi informasi dalam memperkecil kesempatan praktik kecurangan laporan keuangan.

Menurut ACFE (2019) perusahaan manufaktur menjadi sektor yang paling rentan melakukan kasus kecurangan karena melibatkan rantai nilai produksi yang panjang dan kompleks serta memerlukan beragam metode akuntansi dan asumsi. Sehingga peneliti memilih sampel sektor perusahaan manufaktur tahun 2018 sampai tahun 2020. Pemilihan periode penelitian ini juga dikarenakan fenomena yang terjadi masih dalam rentang waktu yang ideal untuk mengetahui apakah suatu perusahaan diketahui melakukan kecurangan. Pembaruan dari penelitian ini yaitu peneliti menggunakan penambahan variabel integrasi teknologi informasi. Peneliti menemukan bahwa integrasi teknologi dapat dijadikan variabel *moderating* berdasarkan riset terdahulu dalam penelitian Mappadang & Yuliansyah (2021). Namun dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang berbeda yaitu dengan menggunakan pengukuran *Enterprise Resource Planning*.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan *gap research* yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk menguji kemampuan teknologi informasi

dalam mendeteksi kesempatan melakukan praktik curang pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2018 sampai tahun 2020.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *nature of industry* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah ketidakefektifan pengawasan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah teknologi informasi memoderasi pengaruh *nature of industry* dan ketidakefektifan pengawasan-terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketidakefektifan pengawasan terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *nature of industry* dan ketidakefektifan pengawasan yang dimoderasi teknologi informasi terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Studi ini dapat dijadikan sumber literatur akademis yang akan membantu akuntan forensik, auditor, pemeriksa kecurangan, dan badan-badan anti kecurangan lainnya dalam mengidentifikasi, dan menyelidiki penyebab terjadinya kecurangan.

- b. Memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan yang diwakili proksi *nature of industry* dan ketidakefektifan pengawasan yang dimoderasi oleh teknologi informasi.
- c. Menambah bukti empiris dan literatur pada peningkatan ilmu akuntansi forensik mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan serta berbagai komponen yang dapat menyebabkan munculnya tindakan kecurangan dalam pelaporan melalui penggunaan proksi-proksi yang telah ditetapkan.
- d. Memberikan masukan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian faktor kecurangan (*fraud*) yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

Memberikan informasi kepada auditor untuk mengembangkan potensinya dalam mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhi potensi auditor dalam memberi penilaian risiko dalam mendeteksi kecurangan terutama terkait akun-akun yang diestimasi dan keefektifan pengawasan di dalam perusahaan yang telah menerapkan integrasi teknologi informasi.

b. Bagi Kreditor

Memberikan informasi pada kreditor untuk menilai risiko pemberian kredit pada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi, apakah penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

c. Bagi Investor

Memberikan informasi pada investor untuk menilai risiko investasi pada perusahaan yang telah menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi, apakah penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

d. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi bagi pemerintah terutama di sektor instansi keuangan untuk dapat melakukan evaluasi kebijakan yang bisa dilaksanakan dalam mencegah tindakan kecurangan di dalam perusahaan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berada di bawah pemerintahan Indonesia sejalan dengan motonya yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi industri di pasar modal dari kesempatan munculnya praktik manipulasi keuangan yang dilakukan perusahaan.